




KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM


 <p>KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</p> <p>SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM</p>	Nomor SOP	SOP.1/SETJEN/ROKUM/10.04.D.2/10/2022
	Tanggal Pembuatan	1 NOVEMBER 2022
	Tanggal Revisi	
	Revisi yang ke	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	KEPALA BIRO HUKUM ttd. SUPARDI, S.H.,M.H. NIP.196704191994031004
Nama SOP	PEMERIKSAAN NASKAH DENGAN SOFTFILE	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none">UU NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERNTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UU NO. 13 TAHUN 2022PERPRES NO. 33 TAHUN 2012 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONALPERPRES NO. 87 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU. NO.12 TAHUN 2011PERPRES NO. 92 TAHUN 2020 TENTANG KLHKPERMENPAN RB NO. 35 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTHANPERMEN LHK NO. 15 TAHUN 2015 TENTANG ORANISASI DAN TATA KERJA KLHKPERMEN LHK NO. P.100 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERNTUKAN PUU DI KLHKPERMENHUT NO. P.39 TAHUN 2014 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENHUTPERMEN KUMHAM NO. 8 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM	<ol style="list-style-type: none">MEMILIKI KEMAMPUAN MEMAHAMI PROSES PENYUSUNAN PUUMEMILIKI PROSES PENGUNGGAHAN DATA KE DALAM WEBSITE JDIIH	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
<ol style="list-style-type: none">SOP PENYUSUNAN PERMEN	<ol style="list-style-type: none">SALINAN PERMEN LHKKOMPUTER/LAPTOP/PRINTER/SCANNERJARINGAN INTERNET	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
BILA SOP INI TIDAK DILAKSANAKAN MAKA PENYEBARLUASAN PUU DALAM WEBSITE JDIIH INFORMASI TIDAK BISA DITINDAKLANJUTI	DICATAT SEBAGAI ARSIP DOKUMEN MANUAL	


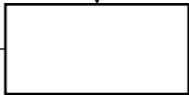
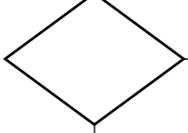
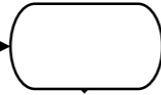
No	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KETERANGAN
		KEPALA BIRO HUKUM	KABAG APP	ANALIS INFORMASI DAN DISEMENASI HUKUM	KELENGKAPAN	WAKTU (SATUAN)	KELUARAN	
1	MEMBERIKAN SALINAN HARDCOPY PERATURAN UNDANG-UNDANG				SALINAN HARDCOPY DAN SOFTFILE YANG TERINTEGRASI	15 menit	DISPOSISI	SOP SURAT MASUK
2	MEMBERIKAN SALINAN HARDCOPY DAN SOFTCOPY PERATURAN UNDANG-UNDANG				DISPOSISI	15 menit	DISPOSISI DAN SALINAN HARDCOPY DAN SOFTFILE YANG TERINTEGRASI	
3	MEMERIKSA KELENGKAPAN SALINAN HARDCOPY DAN SOFTCOPY PERATURAN UNDANG-UNDANG, DAN MELAPORKAN HASIL VERIFIKASI ATAS SALINAN HARDCOPY DAN SOFTCOPY PERATURAN UNDANG-UNDANG				SALINAN HARDCOPY DAN SOFTFILE YANG TERINTEGRASI	1000 menit	SALINAN HARDCOPY DAN SOFTFILE YANG SUDAH LENGKAP DAN YANG SUDAH DIVERIFIKASI	
4	MEMVERIFIKASI KELENGKAPAN SALINAN HARDCOPY DAN SOFTCOPY PERATURAN UNDANG-UNDANG DAN LAPORAN HASIL VERIFIKASI DAN MEMERINTAHKAN UNTUK MENGHIMPUN				SALINAN HARDCOPY DAN SOFTFILE YANG SUDAH LENGKAP DAN YANG SUDAH DIVERIFIKASI	210 menit	SOFTCOPY PPU (FILE PDF) YANG LENGKAP DAN SUDAH DIVERIFIKASIKAN	
5	MENGHIMPUN HARDCOPY PERATURAN UNDANG-UNDANG UNTUK DI ARSIPKAN (PENYIMPANAN SEMENTARA)				SOFTCOPY PPU (FILE PDF) YANG LENGKAP DAN SUDAH DIVERIFIKASIKAN	15 menit	SOFTFILE PDF HIMPUN/ARSIP KE HARDISK	
Total waktu						1255 menit		


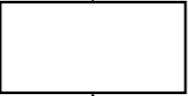
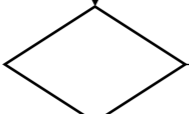



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM

 <p>KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</p> <p>SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM</p>	Nomor SOP	SOP.2/SETJEN/ROKUM/10.04.D.2/10/2022
	Tanggal Pembuatan	1 NOVEMBER 2022
	Tanggal Revisi	
	Revisi yang ke	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	KEPALA BIRO HUKUM ttd. SUPARDI, S.H.,M.H. NIP.196704191994031004
Nama SOP	KOORDINASI PERGUNGGAHAN PUU DALAM WEBSITE	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none">UU NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERNTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UU NO. 13 TAHUN 2022PERPRES NO. 33 TAHUN 2012 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONALPERPRES NO. 87 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU. NO.12 TAHUN 2011PERPRES NO. 92 TAHUN 2020 TENTANG KLHKPERMENPAN RB NO. 35 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTHANPERMEN LHK NO. 15 TAHUN 2015 TENTANG ORANISASI DAN TATA KERJA KLHKPERMEN LHK NO. P.100 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERNTUKAN PUU DI KLHKPERMENHUT NO. P.39 TAHUN 2014 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENHUTPERMEN KUMHAM NO. 8 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM	<ol style="list-style-type: none">MEMILIKI KEMAMPUAN MEMAHAMI PROSES PENYUSUNAN PUUMEMILIKI PROSES PENGUNGGAHAN DATA KE DALAM WEBSITE JDIIH	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
<ol style="list-style-type: none">SOP PENYUSUNAN PERMENSOP PEMERIKSAAN NASKAH DENGAN SOFTFILE PUU	<ol style="list-style-type: none">SALINAN PERMEN LHKKOMPUTER/LAPTOP/PRINTER/SCANNERJARINGAN INTERNET	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
BILA SOP INI TIDAK DILAKSANAKAN MAKA PROSES PENGEMBANGAN APLIKASI WEBSITE JDIIH INFORMASI TIDAK BISA DITINDAKLANJUTI	DICATAT SEBAGAI ARSIP DOKUMEN MANUAL	

No	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		KABAG APP	ANALIS INFORMASI DAN DISEMENASI	KELENGKAPAN	WAKTU (SATUAN)	KELUARAN	
1	MEMBERIKAN SALINAN SOFTCOPY PERATURAN PUU YANG SUDAH DIVERIFIKASI			SOFTCOPY PUU (PDF)	15 menit	DISPOSISI	SOP SURAT MASUK
2	MENGUNGGAH DOKUMEN PERATURAN UNDANG-UNDANG DAN METADATANYA KE DALAM SISTEM, DAN MELAPORKAN PENGUNGGAHAN DOKUMEN DIGITAL PERATURAN UNDANG-UNDANG DALAM WEBSITE JDIH KLHK			DISPOSISI DAN SOFTCOPY PUU (PDF) DAN METADATA	60 menit	SOFTCOPY PUU (PDF) DAN METADATA YANG SUDAH DIUNGGAH DALAM WEBSITE JDIH KLHK, DAN LAPORAN PENGUNGGAHAN DOKUMEN	
3	MEMVERIFIKASI PENGUNGGAHAN DOKUMEN DIGITAL PERATURAN UNDANG-UNDANG DALAM WEBSITE JDIH KLHK DAN MEMERINTAHKAN UNTUK MENGHIMPUN DOKUMEN DIGITAL PUU		T	SOFTCOPY PUU (PDF) DAN METADATA YANG SUDAH DIUNGGAH DALAM WEBSITE JDIH KLHK, DAN LAPORAN PENGUNGGAHAN DOKUMEN	30 menit	SOFTCOPY PUU (PDF) DAN METADATA YANG SUDAH DIUNGGAH DALAM WEBSITE JDIH KLHK, DAN LAPORAN PENGUNGGAHAN DOKUMEN YANG SUDAH DIVERIFIKASI	
4	MENGHIMPUN DOKUMEN DIGITAL PERATURAN UNDANG-UNDANG DALAM DATABASE HARDDISK PERATURAN UNDANG-UNDANG	Y		SOFTCOPY PUU (PDF) DAN METADATA YANG SUDAH DIUNGGAH DALAM WEBSITE JDIH KLHK, DAN LAPORAN PENGUNGGAHAN DOKUMEN YANG SUDAH DIVERIFIKASI	15 menit	ARSIP DATABASE TERHIMPUN YANG SUDAH DIUNGGAH	
Total waktu					120 menit		

No.	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		KABAG APP	ANALIS INFORMASI DAN DISEMENASI HUKUM	KELENGKAPAN	WAKTU (SATUAN)	KELUARAN	
1	MEMBERIKAN SALINAN SOFTCOPY DAN HARDCOPY PERATURAN UNDANG-UNDANG YANG SUDAH DIVERIFIKASI DAN MEMERINTAHKAN MENYUSUN ABSTRAK PERATURAN UNDANG-UNDANG			ARSIP DATABASE TERHIMPUN	15 menit	DISPOSISI	SOP SURAT MASUK
2	MENYUSUN ABSTRAK PERATURAN UNDANG-UNDANG, DAN MELAPORKAN ABSTRAK PERATURAN UNDANG-UNDANG DALAM WEBSITE JDIIH KLHK			DISPOSISI DAN ARSIP DATABASE TERHIMPUN	420 menit	KONSEP ABSTRAKS	
3	MEMVERIFIKASI ABSTRAK PERATURAN UNDANG-UNDANG DALAM WEBSITE JDIIH KLHK DAN MEMERINTAHKAN UNTUK MENGHIMPUN ABSTRAK		T	KONSEP ABSTRAKS	120 menit	ABSTRAKSI YANG SUDAH DIVERIFIKASI	
4	MENGHIMPUN ABSTRAK PERATURAN UNDANG-UNDANG DALAM DATABASE HARDDISK PERATURAN UNDANG-UNDANG	Y		ABSTRAKS YANG SUDAH DIVERIFIKASI	15 menit	HIMPUNAN ABSTRAK PUU	
Total waktu					570 menit		



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM

<p>KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</p> <p>SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM</p>	Nomor SOP	SOP.3/SETJEN/ROKUM/10.04.D.2/10/2022
	Tanggal Pembuatan	11 OKTOBER 2022
	Tanggal Revisi	-
	Revisi yang ke	-
	Tanggal Efektif	21 OKTOBER 2022
	Disahkan oleh	KEPALA BIRO HUKUM ttd. SUPARDI, S.H.,M.H. NIP.196704191994031004
Nama SOP	PEMBUATAN ABSTRAK	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none">UU NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBERNTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN UU NO. 13 TAHUN 2022PERPRES NO. 33 TAHUN 2012 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONALPERPRES NO. 87 TAHUN 2014 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU. NO.12 TAHUN 2011PERPRES NO. 92 TAHUN 2020 TENTANG KLHKPERMENPAN RB NO. 35 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTHANPERMEN LHK NO. 15 TAHUN 2015 TENTANG ORANISASI DAN TATA KERJA KLHKPERMEN LHK NO. P.100 TAHUN 2018 TENTANG TATA CARA PEMBERNTUKAN PUU DI KLHKPERMENHUT NO. P.39 TAHUN 2014 TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENHUTPERMEN KUMHAM NO. 8 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN DAN INFORMASI HUKUM	<ol style="list-style-type: none">MEMILIKI KEMAMPUAN MEMAHAMI PROSES PENYUSUNAN PUUMEMILIKI PROSES PENGUNGGAHAN DATA KE DALAM WEBSITE JDIIH	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
<ol style="list-style-type: none">SOP PENYUSUNAN PERMENSOP PEMERIKSAAN NASKAH DENGAN SOFTFILE PUUSOP KOORDINASI PENGUNGGAHAN PUU DALAM WEBSITE JDIIH KLHK	<ol style="list-style-type: none">SALINAN PERMEN LHKKOMPUTER/LAPTOP/PRINTER/SCANNERJARINGAN INTERNET	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
BILA SOP INI TIDAK DILAKSANAKAN MAKA PROSES PENGEMBANGAN APLIKASI WEBSITE JDIIH INFORMASI TIDAK BISA DITINDAKLANJUTI	DICATAT SEBAGAI ARSIP DOKUMEN MANUAL	

No.	KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		KABAG APP	ANALIS INFORMASI DAN DISEMENASI HUKUM	KELENGKAPAN	WAKTU (SATUAN)	KELUARAN	
1	MEMBERIKAN SALINAN SOFTCOPY DAN HADRCOPY PERATURAN UNDANG-UNDANG YANG SUDAH DIVERIFIKASI DAN MEMERINTAHKAN MENYUSUN SIMPLIKASI PERATURAN UNDANG-UNDANG			ASRIP/HIMPUNAN ABSTRAK PUU	15 menit	DISPOSISI	SOP SURAT MASUK
2	MENYUSUN SIMPLIKASI PERATURAN UNDANG-UNDANG, DAN MELAPORKAN SIMPLIFIKASI PERATURAN UNDANG-UNDANG DALAM WEBSITE JDIIH KLHK			DISPOSISI DAN ASRIP/HIMPUNAN ABSTRAK PUU	450 menit	DISPOSISI DAN KONSEP SIMPLIFIKASI	
3	MEMVERIFIKASI PERATURAN UNDANG-UNDANG DALAM WEBSITE JDIIH KLHK DAN MEMERINTAHKAN MENGHIMPUN SIMPLIFIKASI PERATURAN UNDANG-UNDANG DALAM DATABASE HARDDISK PERATURAN UNDANG-UNDANG		T	KONSEP SIMPLIFIKASI	120 menit	KONSEP SIMPLIFIKASI YANG SUDAH DIVERIFIKASI	
4	MENGHIMPUN SIMPLIFIKASI PERATURAN UNDANG-UNDANG DALAM DATABASE HARDDISK PERATURAN UNDANG-UNDANG	Y		KONSEP SIMPLIFIKASI YANG SUDAH DIVERIFIKASI	15 menit	HIMPUNAN SIMPLIFIKASI	
Total waktu					600 menit		



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SEKRETARIAT JENDERAL
BIRO HUKUM

<p>KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN</p> <p>SEKRETARIAT JENDERAL BIRO HUKUM</p>	Nomor SOP	SOP.4/SETJEN/ROKUM/10.04.D.2/10/2022
	Tanggal Pembuatan	1 NOVEMBER 2022
	Tanggal Revisi	
	Revisi yang ke	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	KEPALA BIRO HUKUM ttd. SUPARDI, S.H.,M.H. NIP.196704191994031004
Nama SOP	SIMPLIFIKASI	
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah Beberapa kali Diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 20222. PERPRES Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional3. PERPRES Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20114. PERPRES Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.100/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2018 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor: 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menhut-II/2014 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Kehutanan	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kemampuan memahami proses penyusunan PUU2. Memahami proses pengunggahan data ke dalam website JDIH3. Memiliki kemampuan perancangan aplikasi dan database	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Penyusunan Peraturan Menteri2. SOP Mekanisme Pemeriksaan Naskah dengan Softfile Peraturan Perundang-undangan3. SOP Mekanisme Koordinasi Pengunggahan Peraturan Perundang-undangan dalam Website JDIH KLHK4. SOP Mekanisme Pembuatan Abstrak Peraturan Perundang-undangan	<ol style="list-style-type: none">1. Salinan Peraturan Menteri KLHK2. Komputer/Laptop/Printer/Scanner3. Jaringan Internet	
PERINGATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :	
BILA SOP INI TIDAK DILAKSANAKAN MAKA PENYEBARLUASAN PUU DALAM WEBSITE JDIH INFORMASI TIDAK BISA DITINDAKLANJUTI	DICATAT SEBAGAI ARSIP DOKUMEN MANUAL	